

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Kerja (Renja), Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur staf yang melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat baik secara administrasi maupun secara teknis. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

1.1. Latar Belakang

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berpedoman kepada Peraturan tersebut, maka Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2021 merupakan rencana tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021 dan menjadi landasan/pedoman/acuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk digabung menjadi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggaran tahun 2021 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2021 diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Barat. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan anggota Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan beberapa Staf di Sub Bagian Program dan Keuangan. Setelah ditetapkannya Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja, maka tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan orientasi. Pelaksanaan orientasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai Rencana Kerja OPD tahun 2021 dan menghimpun

masuk-masukan dari bagian-bagian yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Masukan-masukan tersebut tentu didasari karena kebutuhan untuk kelancaran tugas kedewanan anggota DPRD baik secara keuangan maupun secara administrasi. Di dalam orientasi juga dilakukan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja. Penyusunan agenda kerja tetap memperhatikan agenda kerja yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator pembangunan di daerah, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui peraturan gubernur mengenai Kalender Perencanaan.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sudah melakukan kajian dan pertimbangan terhadap capaian kinerja tahun 2019 dan evaluasi awal tahun 2020 serta capaian kinerja terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2016-2021. Selain itu dengan diterbitkannya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat beberapa penyesuaian terhadap nomenklatur kegiatan yang telah dipetakan oleh Sekretariat DPRD yang kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikator yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Rencana Kerja ini merupakan pedoman guna Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kemudian diatur dalam Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD terdapat hubungan tidak langsung dengan Renja Kementrian/Lembaga yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dengan beberapa kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD. Kemudian apabila dikaitkan dengan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota secara langsung belum jelas hubungannya namun dengan dilaksanakan fungsi Dewan yaitu fungsi pengawasan, maka secara tidak langsung terdapat keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Renja Kabupaten/Kota, Renja yang disusun adalah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Rencana Kerja yang diajukan oleh Sekretariat DPRD tahun 2021 dengan beberapa program dan kegiatan nantinya akan menjadi dasar pengalokasian dana dalam penyusunan KUA/PPAS tahun 2021 untuk menjadi RAPBD yang akan ditetapkan mejadi APBD Tahun 2021 dengan catatan Rancangan Rencana Kerja tersebut harus mendapat legitimasi oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam RKPD

Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat (3) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438).
3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan terakhir Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara nomor 4614).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, pasal 9 dijelaskan tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, dan pembagian tipe Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2020
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020.

13. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
14. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Perda No. 5 tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2020.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 tanggal 5 Februari tahun 2018.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat tahun 2021. Selain itu bertujuan untuk menyelaraskan Rencana Kerja (Renja) yang disusun untuk tahun 2021 sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan terciptanya efektivitas dan efisien penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Dewan.

Sebagai tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
2. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan pendanaan untuk tahun 2021.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 terdapat 6 (enam) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan, program dan kegiatan yang ada tersebut telah dilaksanakan, namun di dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang melebihi target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, baik secara fisik maupun keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir tahun anggaran 2019 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :

- a. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
Kegiatan ini untuk memfasilitasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di Sekretaria. DPRD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tidak tercapainya target keuangan pada kegiatan ini adalah karena terdapatnya jumlah sisa tender dimana beberapa kegiatan pengadaannya dilaksanakan melalui sistem kontrak dengan penentuan Harga Perkiraan Sendiri mengikuti harga pasaran. Namun dalam pelaksanaannya terdapat penawaran yang lebih rendah dan tentunya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- b. **Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur**
Kegiatan ini untuk meningkatkan ketahanan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD, dalam pelaksanaannya serapan anggaran tidak mencapai target karena Adanya kegiatan di mesjid raya sehingga honor penceramah berlebih dan jumlah rapat paripurna yang di bawah perkiraan membuat honor pembaca Al-Quran tidak terealisasi seluruhnya.
- c. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan segala kebutuhan perlatan dan perlengkapan kantor, tidak tercapainya realisasi anggaran kegiatan ini adalah disebabkan karena faktor eksternal yaitu pasca terjadinya demonstrasi mahasiswa terkait pelemahan KPK, terdapat beberapa kerusakan pada peralatan dan perlengkapan utama gedung kantor. Oelh sebab itu sebagian biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang rencananya digunakan untuk kebutuhan lainnya dialihkan untuk memenuhi kebutuhan utama gedung kantor sehingga penggunaan anggaran tidak terserap dengan maksimal.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 11 (sebelas) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :

- a. **Pengadaan Mebeleur**
Kegiatan ini merupakan pengadaan mebel dan furnitur yang terdapat di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tidak tercapainya target keuangan pada kegiatan ini adalah karena terjadinya demonstrasi akhir tahun 2019 yang menyebabkan beberapa anggaran

- dialihkan untuk memenuhi kebutuhan meubel yang rusak. Selain itu terdapat sisa lelang kegiatan yang pengadaannya dilaksanakan dengan sistem tender di ULP Provinsi Sumatera Barat dimana secara perencanaan tetap mengacu kepada harga di pasaran
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
Kegiatan ini digunakan untuk memelihara peralatan studio, alat komunikasi dan alat informasi secara rutin/berkala untuk menunjang kelancaran tugas. Sisa kegiatan merupakan pengalihan anggaran untuk perbaikan sound sistem yang rusak akibat demonstrasi akhir 2019
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara peralatan dan perlengkapan rumah dinas ketua DPRD. Tidak tercapainya realisasi anggaran adalah disebabkan karena efisiensi anggaran yang rencananya dialihkan untuk rehab rumah dinas.
 - d. Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
Kegiatan ini pada awalnya adalah untuk melaksanakan penggantian *ducting Air Conditioner (AC)* Ruang Paripurna pada gedung lama DPRD. Sistem pengadaan dilaksanakan secara tender di ULP Provinsi Sumatera Barat, namun dalam pelaksanaan lelang tidak terdapat penawaran pelaksana yang memenuhi syarat dalam melaksanakan rehab tersebut. Dan pada tahap perubahan anggaran Pemeliharaan pemeliharaan/penggantian *ducting AC* tersebut dihapuskan karena waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk penyelesaian fisik pemeliharaan. Adapun tidak tercapainya target anggaran pada kegiatan ini adalah karena masih terdapatnya biaya untuk pengawasan yang tidak bisa dibayarkan karena pelaksanaan rehab tidak jadi dilaksanakan
 - e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Tidak tercapainya target anggaran pada kegiatan ini adalah karena gagalnya lelang pada pengadaan i-Perisalah. i-Perisalah merupakan alat notulensi secara elektronik dimana suara yang terrekam di dalam *microphone* ke pengeras suara dapat ditulis ke dalam media/alatcetak oleh alat ini, sehingga dengan diadakannya alat ini ke depannya bisa membantu mempercepat notulis untuk menyusun notulensi pada rapat-rapat.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, yaitu :

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan kemampuan staf terhadap peraturan perundang-undangan, kegiatan ini baru dapat terlaksana jika adanya dasar-dasar yang relevan seperti undangan atas kerjasama Pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan. Pada kegiatan ini adanya efisiensi karena faktor eksternal, pelaksanaan disesuaikan dengan undangan pihak terkait serta sisa kegiatan merupakan sisa perjalanan dinas dalam daerah yang tidak terpakai karena sedikitnya kegiatan sosialisasi di dalam daerah.

- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kinerja untuk pendukung kelancaran tugas perbantuan kedewanan. Target anggaran kegiatan ini tidak tercapai karena sama halnya dengan kegiatan Sosialisasi peraturan Perundang-undangan yaitu untuk melaksanakannya dibutuhkan dasar-dasar yang relevan.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan seluruh kegiatannya memnuhi target keuangan.

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ada 8 (delapan) kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan, diantaranya adalah :

a. Pembahasan Rancangan Perda

Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda dalam pelaksanaan bertujuan agar tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Tidak tercapainya kinerja anggaran lebih disebabkan karena adanya beberapa anggota Dewan yang tidak memaksimalkan jumlah hari perjalanan dinas, sedangkan untuk pencapaian kinerja seharusnya anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas harus mengikuti jumlah hari yang telah direncanakan.

b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekreteraris DPRD

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD terhadap bidang tugasnya. Tidak tercapainya kinerja anggaran lebih disebabkan karena adanya beberapa anggota Dewan yang tidak memaksimalkan jumlah hari perjalanan dinas, sedangkan untuk pencapaian kinerja seharusnya anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas harus mengikuti jumlah hari yang telah direncanakan.

c. Reses.

Kegiatan reses bertujuan untuk menjangring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD ke daerah pemilihan masing-masing. Tidak tercapainya target keuangan disebabkan oleh beberapa anggota DPRD tidak memaksimalkan jumlah hari pelaksanaan reses sehingga berim[likasi kepada jumlah anggaran yang dibelanjakan.

d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan dengan melakukan kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Provinsi Sumatera Barat serta luar negeri dengan tujuan melihat perkembangan di daerah tempat tujuan untuk dapat diterapkan di Daerah Sumatera Barat, sekaligus melakukan studi perbandingan untuk disampaikan kepada Pemerintah Sumatera Barat unuk dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat. Pada dasarnya kinerja fisik telah tercapai, namun kinerja keuangan tidak tercapai karena adanya kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri yang tidak terlaksana disebabkan keterbatasan waku pelaksanaan karena padatnya agenda kedewanan dan adanya efisiensi penggunaan anggaran kegiatan luar negeri.

- e. Hearing/dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjangkau aspirasi masyarakat terkait isu-isu yang berkembang dan permasalahan masyarakat yang sedang dihadapi dengan tujuan bisa disampaikan secara cepat kepada OPD terkait melalui teknis kegiatannya. Tidak tercapainya kegiatan ini adalah karena hearing dilaksanakan dalam rangka isu-isu terbaru namun dalam pelaksanaannya tidak terdapat isu strategis yang dihadapi sehingga serapan anggaran tidak termaksimalkan dengan baik.

- f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh mitra komisi-komisi di DPRD sehingga berjalan sesuai dengan sasaran. Tidak tercapainya kegiatan ini karena keterbatasan waktu dalam melaksanakan pemantauan sehingga penggunaan anggaran hanya sebatas persiapan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan beberapa kegiatan yang memenuhi target dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdapat 13 (tiga belas) kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan baik fisik maupun keuangan dengan rincian :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jasa pemeliharaan dan peralatan rumah tangga keperluan kantor untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kedewanan.

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan referensi/bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD

- g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah ditujukan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi baik ke luar maupun ke luar provinsi Sumatera Barat.

- h. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman sarannya adalah tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan memberikan pelayanan kepada DPRD dalam rangka melaksanakan rapat-rapat sebagai salah satu tugas pokok DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan

- i. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor

Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor ditujukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan ruangan kantor sekretariat DPRD melalui pengadaan petugas kebersihan. Kegiatan Jasa Tenaga Sopir ditujukan untuk menjamin ketersediaan tenaga sopir untuk tugas-tugas anggota dewan dan staf

sekretariat DPRD melalui pengadaan Tenaga Sopir. Kegiatan Penyediaan Jasa Jasa Pengamanan Kantor ditujukan untuk menjamin keamanan situasi dan kondisi lingkungan perkantoran sekretariat DPRD melalui pengadaan tenaga pengamanan kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 8 (delapan) kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diantaranya :

- a. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan komputer dan jaringannya.
- b. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi
Pengadaan ini bertujuan untuk menyediakan alat studio terutama tata suara pada ruang rapat
- c. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan Alat Studio, Alat Komunikasi, dan Alat Informasi pada kantor sekretariat DPRD, disesuaikan dengan kebutuhan gedung lama dan gedung baru.
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kapasitas meubel di Sekretariat DPRD
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan
Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringannya
- g. Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD
Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD..
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Installasi dan Jaringan
Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya pemeliharaan installasi dan jaringan untuk menunjang kelancaran tugas.
- i. Pengadaan Peralatan/perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan perlengkapan peralatan rumah dinas ketua DPRD
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess pada kantor Sekretariat DPRD.
- k. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan mobil dinas untuk sekretaris DPR Provinsi Sumatera Barat.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdapat 1 (satu) kegiatan yang memenuhi target yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai terhadap keseragaman penggunaan pakaian dinas sesuai dengan aturan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, tidak terdapat kegiatan yang mencapai target keuangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan terdapat 2 (dua) kegiatan yang memenuhi target yaitu :

- a. **Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**
Kegiatan ini bertujuan untuk merencanakan dan memproses sistem anggaran pada sekretariat DPRD untuk kelancaran administrasi keuangan.
 - b. **Penatausahaan Keuangan OPD**
Kegiatan penatausahaan keuangan OPD bertujuan untuk menata dan menyusun pelaksanaan kegiatan keuangan OPD di Sekretariat DPRD dengan baik dari awal pelaksanaan kegiatan sampai berakhirnya kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan
 - c. **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen realisasi kinerja SKPD
 - d. **Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD**
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Aset OPD.
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** terdapat 5 (lima) kegiatan yang memenuhi target yaitu :
- a. **Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah**
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan kunjungan kerja ke dalam daerah Sumatera Barat
 - b. **Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda**
Kegiatan ini bertujuan untuk pelayanan tamu pemda yang berkunjung untuk urusan Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat.
 - c. **Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan**
 - d. **Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda**
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan seminar dalam rangka pembahasan Ranperda yang kemudian ditetapkan menjadi Perda.
 - e. **Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah**
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi ke masyarakat melalui sekretariat DPRD mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - f. **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh DPRD.

No	Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		Sisa	Hasil / Outcome	Indikator Output Kegiatan			Hambatan/Permasalahan
		Rp.	Rp.	%	Rp.		Kualitatif	Kuantitatif		
							Target	Realisasi		
	BELANJA DAERAH	144.126.078.603,00								
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.558.991.765,00								
	BELANJA LANGSUNG	94.567.086.838,00	89.258.209.488,56	94,39%	363.330.756,00					
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.571.622.621,00	15.285.402.600,00	104,90%	363.330.756,00	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.934.381.700,00	1.926.904.354,00	99,61%	7.477.346,00	Terkirimnya surat dan paket untuk kepentingan dinas	Tersedianya benda pos materai 6000 dan 3000, pengiriman surat dan honor pegawai PTT selama 12 bulan	100%	100%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.197.800.000,00	2.009.027.996,00	91,41%	188.772.004,00	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet	Tersedianya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 bulan	100%	100%	Efisiensi anggaran
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2.430.051.649,00	2.422.274.107,57	99,68%	7.777.541,43	Tersedianya Kenyamanan dan Kebersihan, dan sopir Kantor	Tersedianya Kenyamanan dan Kebersihan, dan Sopir Kantor untuk 12 bulan	100%	100%	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.800.000,00	349.530.150,00	84,88%	62.269.850,00	Tercapainya ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang ada pada kantor Sekretariat DPRD	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	Sisa lelang dan tender
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	379.479.272,00	376.924.619,00	99,33%	2.554.653,00	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan asuransi gedung	Tersedianya jaminan asuransi kendaraan operasional kantor dan gedung (premi Asuransi BMD dan PBB) untuk 12 bulan	100%	100%	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	286.495.300,00	270.085.000,00	94,27%	16.410.300,00	Tercapainya ketersediaan ATK	Tersedianya alatt tulis kantor untuk 12 bulan, perlengkapan kantor	100%	100%	

7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	781.233.600,00	690.888.000,00	88,44%	90.345.600,00	Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	100%	100%	Sisa lelang dan tender
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	112.702.400,00	108.783.000,00	96,52%	3.919.400,00	Tercapainya kebutuhan penerangan pada bangunan /ruangan yang ada pada kantor sekretariat dewan	Terpenuhi kebutuhan alat-alat listrik untuk penerangan kantor untuk 12 bulan	100%	100%	
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.775.000,00	134.461.000,00	97,59%	3.314.000,00	Tercapainya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan yang ada pada kantor Sekretariat DPRD	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64.305.000,00	60.525.000,00	94,12%	3.780.000,00	Tercapainya ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada kantor sekretariat DPRD	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	699.826.400,00	664.913.000,00	95,01%	34.913.400,00	Tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar daerah dan nasional	100%	100%	
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.399.392.000,00	3.337.455.784,00	98,18%	61.936.216,00	Lancarnya Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi ke luar dan dalam daerah untuk 12 bulan	100%	100%	
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	43.600.000,00	33.600.000,00	77,06%	10.000.000,00	Meningkatnya Ketahanan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD	Terlaksananya pembayaran jasa layanan pembinaan mental aparatur, pembinaan fisik aparatur	100%	100%	penyesuaian kebutuhan dan efisiensi anggaran
14	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.385.060.000,00	1.317.780.500,00	95,14%	67.279.500,00	Terwujudnya Ketersediaan makan dan minum rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD	Tersedianya makan dan minum untuk 12 bulan	100%		

15	Pengelolaan dan Pendataan Dokumen Arsip SKPD	307.720.300,00	307.365.100,00	99,88%	355.200,00	Tertatanya Administrasi arsip dengan baik	Tersedianya kebutuhan pengelolaan arsip aktif dan pasif untuk 1 tahun	100%	100%	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan Anggota DPRD					Terwujudnya Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Prov. Sumbar	Terpeliharanya Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD Prov. Sumbar sebanyak 65 orang			
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.118.009.038,00	10.505.168.512,56	86,69%	1.612.840.525,44	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	
1	Pengadaan mebeleur	764.537.920,00	660.797.920,00	86,43%	103.740.000,00	Tercapainya ketersediaan meubelair yang ada pada kantor Sekretariat DPRD	Tercapainya ketersediaan meubelair yang ada pada kantor Sekretariat DPRD	100%	100%	Sisa lelang dan tender
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	446.700.320,00	440.109.120,00	98,52%	6.591.200,00	Tercapainya ketersediaan komputer dan jaringan komputerisasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD	Tercapainya ketersediaan komputer dan jaringan komputerisasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD	100%	100%	
3	Pengadaan eralatan Studio Komunikasi dan Informasi	993.881.718,00	985.880.200,00	99,19%	8.001.518,00	Tercapainya ketersediaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang ada pada kantor Sekretariat DPRD	Tercapainya Ketersediaan alat studio, komunikasi dan informasi yang ada pada kantor sekretariat DPRD	100%	100%	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	105.500.000,00	94.624.300,00	89,69%	10.875.700,00	Terlaksananya pemeliharaan alat studio, komunikasi dan informasi kantor	Pemeliharaan Peralatn studio, komunikasi dan informasi kantor untuk 1 tahun	100%	100%	Efisiensi anggaran
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.281.300.000,00	1.273.775.900,00	99,41%	7.524.100,00	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor untuk 1 tahun,	100%	100%	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/Dinas	1.124.173.325,00	1.058.441.011,00	94,15%	65.732.314,00	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional	100%	100%	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala	426.100.000,00	410.170.820,00	96,26%	15.929.180,00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin	100%	100%	

	Peralatan/Perlengkapan Kantor						peralatan dan perlengkapan gedung kantor			
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	166.750.000,00	163.355.000,00	97,96%	3.395.000,00	Terpeliharanya Meubelair Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin mebeulair kantor	100%	100%	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	38.550.000,00	38.518.000,00	99,92%	32.000,00	Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi kantor	Pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi kantor untuk 1 tahun	100%	100%	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	160.000.000,00	157.975.000,00	98,73%	2.025.000,00	Terpeliharanya instalasi dan jaringan kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin instalasi dan jaringan kantor untuk 1 tahun	100%	100%	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	295.450.000,00	271.096.886,00	91,76%	24.353.114,00	Tertatanya administrasi asset dengan baik	Tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD untuk 1 tahun	100%	100%	Pemeliharaan dilaksanakan secara berkala terhadap kendaraan lama
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.350.000.000,00	1.344.860.000,00	99,62%	5.140.000,00	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Prov. Sumbar dan Aparatur DPRD Prov. Sumbar	Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas bermotor	100%	100%	
13	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	506.080.000,00	491.850.440,00	97,19%	14.229.560,00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%	100%	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess	828.416.255,00	823.846.947,56	99,45%	4.569.307,44	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan pimpinan DPRD dan Sekretaris	Pemeliharaan kendaraan jabatan	100%	100%	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	243.550.000,00	211.322.000,00	86,77%	32.228.000,00	Tersedianya perlengkapan pakai habis dan peralatan rumah jabatan/dinas/mess	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas/mess dan kebutuhan pokok Ketua DPRD untuk 1 tahun	100%	100%	Biaya pemeliharaan rencana dialihkan untuk kebutuhan sarana

										prasarana gedung kantor tidak berjalan
16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.195.169.500,00	1.931.694.968,00	60,46%	1.263.474.532,00	Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess	Pemeliharaan rumah jabatan/dinas/mess, tersedianya jasa petugas satpam dan cleaning service untuk 1 tahun, 6 orang pengaman, 5 orang petugas kebersihan	100%	100%	Sisa lelang dan tender
17	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	191.850.000,00	146.850.000,00	76,54%	45.000.000,00	Meningkatnya pelayanan yang terbaik	Terlaksananya rehab gedung	100%	100%	Sisa lelang dan tender
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.567.050.000,00	1.560.857.500,00	99,60%	440.000,00	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.567.050.000,00	1.560.857.500,00	99,60%	48.558.458,00	Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dan anggota DPRD dalam berpakaian dinas	Terlaksananya Pakaian Dinas PNS/PH dan Anggota DPRD	100%	100%	
D	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	223.470.000,00	174.879.129,00	78,26%	1.062.013,00	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	162.780.000,00	123.708.148,00	76,00%	1.062.013,00	Terdapatnya jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK	Terlaksananya pengiriman Staf untuk mengikuti Bimtek dan Pelatihan sebanyak 12 orang	100%	100%	terbatasnya waktu pelaksanaan
2	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	60.690.000,00	51.170.981,00	84,32%	9.342.957,00	Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengiriman Staf untuk mengikuti Sosialisasi sebanyak 30 orang	100%	100%	terbatasnya waktu pelaksanaan

E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.694.330.800,00	1.674.509.741,00	98,83%	2.151.957,00	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	317.845.000,00	317.482.550,00	99,89%	7.191.000,00	Tersedianya Renja, RKA, DPA	Tersusunnya Renja, RKA, DPA sebanyak 3 laporan	100%	100%	
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	546.600.200,00	545.299.600,00	99,76%	24.949.320,00	Lancarnya pengelolaan Administrasi keuangan SKPD	Terlaksananya pembayaran honor penatausahaan SKPD selama 12 bulan	100%	100%	
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	383.257.000,00	382.615.291,00	99,83%	5.566.020,00	Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPC, LAKIP dan PK serta Laporan Keuangan)	Tersusunannya LAKIP, LPPD, LKPJ, PK dan Laporan Keuangan sebanyak 3 dokumen	1 tahun	1 tahun	
4	Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	446.628.600,00	429.112.300,00	96,08%	2.090.400,00	Terwujudnya pelayanan yang terbaik	Tersedianya Dokumen Perencanaan 1 dokumen	100%	100%	
F	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64.392.604.379,00	60.057.392.006,00	93,27%	17.292.900,00	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	100%	
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	3.984.517.100,00	3.898.949.350,00	97,85%	6.356.113.174,00	Terpublikasinya kegiatan kedewanan di media cetak dan media elektronik	Tersedianya dokumen publikasi pelaksanaan kegiatan kedewanan untuk 1 tahun	100%	100%	
2	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah	17.147.632.293,00	15.415.342.472,00	89,90%	2.010.952.986,00	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	Terlaksananya fungsi pembentukan perda, anggaran, pengawasan, kunker pimpinan dan komisi-komisi luar daerah dan luar negeri	100%	100%	

3	Pembahasan Rancangan Perda	21.829.169.807,00	20.509.006.565,00	93,95%	362.334.116,00	Tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah	Terlaksananya pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD sebanyak 21 Ranperda/keputusan	100%	100%	Anggota DPRD tidak memaksimalkan waktu pelaksanaan perjalanan dinas
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	2.215.010.380,00	2.199.637.400,00	99,31%	251.339.390,00	Terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah	Terselenggaranya jasa pelayanan tamu pemerintah daerah untuk 1 tahun	100%	100%	
5	Reses	5.631.680.000,00	5.179.248.376,00	91,97%	100.279.700,00	Terjaring aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat	Tertampungnya aspirasi masyarakat	100%	100%	Anggota DPRD tidak memaksimalkan waktu pelaksanaan perjalanan dinas
6	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	203.694.800,00	201.078.450,00	98,72%	3.330.342.062,00	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum	Terjalannya kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	100%	100%	
7	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	6.325.268.287,00	6.099.434.100,00	96,43%	5.894.820,00	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	Terlaksananya fungsi pembentukan perda, anggaran, pengawasan, kunker pimpinan dan komisi-komisi dalam daerah	100%	100%	
8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	6.463.530.300,00	5.985.968.881,00	92,61%	15.353.300,00	Meningkatnya kualitas pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang	Terlaksananya workshop/pendalaman tugas dan studi koparatif ke provinsi lain yang dianggap lebih berhasil	100%	100%	Anggota DPRD tidak memaksimalkan waktu pelaksanaan perjalanan dinas
9	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	136.273.212,00	135.573.212,00	99,49%	42.833.100,00	Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi	Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi	100%	100%	

							berupa laporan rekomendasi			
10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	387.308.500,00	387.308.500,00	100,00%	1.439.800,00	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya pemahaman masyarakat dengan tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan	100%	100%	
11	Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat	18.154.200,00	17.054.200,00	93,94%	136.461.400,00	Terjalinnnya komunikasi antara anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	Meningkatnya pembangunan yang tepat sasaran	100%	100%	terbatasnya waktu pelaksanaan
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	50.365.500,00	28.790.500,00	57,16%	98.882.500,00	Meningkatnya pembangunan yang tepat sasaran	Meningkatnya pembangunan yang tepat sasaran	100%	100%	terbatasnya waktu pelaksanaan
				94,93	7.610.633.422,00					

Dari pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diinformasikan di atas ada yang memenuhi target ada yang tidak memenuhi target disebabkan karena belum terencananya program dan kegiatan dengan baik sehingga belum dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Akibat yang timbul dari program-program yang tidak memenuhi target mengakibatkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra tidak tercapai dan rencana yang sudah ditetapkan dalam Renstra tidak dapat terlaksana dengan baik dan perencanaan yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut ke depan Sekretariat akan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyusun Rencana Kerja dan apabila dirasa tidak mungkin dapat terlaksana alangkah baiknya program dan kegiatan tersebut tidak dimunculkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel T.C.29, pada tabel T.C.29 masing-masing kegiatan sudah dicantumkan target dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018.

TABEL T.C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Provinsi Sumatera Barat**

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat yang tepat sasaran selama 1 tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, air, listrik dan kawat / faksimili / internet / VPN untuk 1 tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran PBB dan premi asuransi untuk 1 tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service untuk 1 tahun, Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang, Pembayaran	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	

					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service untuk 1 tahun	1 thn	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 thn	1 thn	
					Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang	1 thn	1 tahun					1 thn	1 thn	
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang	1 thn	1 tahun					1 thn	1 thn	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn	10 macam					1 thn	1 thn	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur, kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik									
					Pembangunan Gedung Kantor	1 unit gedung kantor	1	0.3	0.7	0.7	0.7	0.0	0.3	1	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan roda empat 4 unit	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	4 unit	4 unit	
					Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Peralatan / perlengkapan pakai habis, lemari dinding, tempat tidur	3 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	3 paket	3 paket	
					Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Laptop, PC, Scanner, Printer Photo, Printer, Kamera Shoting, Kamera Tustel, Handycam, CD Player, Televisi, Alat Fitnes, Alat Musik	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn			
					Pengadaan mebeleur	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	9 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	9 paket	9 paket	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Terpeliharanya bangunan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	

					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan DPRD selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan roda empat, kendaraan roda enam dan sepeda motor selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan instalasi dan jaringan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Pemeliharaan meubeleur selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun, Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun, Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	1 tahun	1 thn					1 tahun	1 tahun
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Pemeliharaan instalasi dan jaringan gedung kantor untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat rumah dinas / rumah jabatan	1 unit	1 thn						
					Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor	1 unit	1 thn						
					Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	UPS, Laptop, PC dan printer 10 unit	1 tahun	4 paket					1 tahun	1 tahun

					Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Pengadaan infocus, kamera, handycam dan conference system 1 unit	1 tahun	4 paket						1 tahun	1 tahun		
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun						1 tahun	1 tahun		
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun					
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun						1 tahun	1 tahun		
					Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun	1 tahun						1 tahun	1 tahun		
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%										
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD dan pegawai 130 orang	2 paket										
					Peresmian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024		0										
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat											
					Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam daerah dan luar daerah	12 kali	10 kali	15 kali	12 kali	12 kali						

				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis dalam daerah dan luar daerah	10 kali	24 orang	10 kali	10 kali					
				Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan wawasan untuk 4 bagian pada Sekretariat DPRD	0	4 bagian							
				Pelatihan Kantor Sendiri	Terlaksananya pelatihan pegawai Sekretariat DPRD untuk 50 orang	0	50 orang							
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD, nilai evaluasi SAKIP, tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan									
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan OPD	3 dokumen								
				Penatausahaan Keuangan OPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan	1 tahun	3 dokumen							
				Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra, persentase kesesuaian Renja dengan RPJMD dan pengendalian asset OPD									
				Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan	1 tahun								

					Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun								
					Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Persentase koordinasi dengan Kabupaten / Kota									
					Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan tamu koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 tahun								
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya studi banding antar provinsi									
					Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan wawasan untuk 4 bagian pada Sekretariat DPRD	1 tahun								
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya pemahaman dan penetapan rancangan APBD tepat waktu, jumlah perda yang disetujui, jumlah rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah									
					Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya penetapan Perda / Keputusan DPRD	22 Ranperda / 38 Keputusan DPRD	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	20 Ranperda / Keputusan DPRD	20 Ranperda / Keputusan DPRD	
					Reses	Terlaksananya reses perorangan dan reses kelompok	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	
					Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terwujudnya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	

					Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Terlaksananya workshop	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	
					Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ranperda dan keputusan DPRD kepada masyarakat dan Pemda Kabupaten / Kota se-Sumbar	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	
					Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen publikasi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
					Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / Kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
					Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	Tersusunnya laporan hasil kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	
					Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	Tersusunnya laporan / rekomendasi pelaksanaan seminar	2 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	2 keg	2 keg	
					Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD dalam daerah	1 tahun	laporan 12 keg, 19 kab/kota					1 tahun	1 tahun	
					Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	3 masa sidang	6 keg					3 masa sidang	3 masa sidang	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun					1 tahun	1 tahun	

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2021, telah dilaksanakan pemetaan kegiatan yang terdapat di dalam Permendagri tersebut. Hasil pemetaan tersebut baru membahas kegiatan yang bersifat urusan, dimana di dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 terdapat dua program urusan menyangkut Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yakni Program Layanan dan Administrasi Keuangan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Pemetaan terhadap kegiatan yang tersedia pada tahun 2020 menjadikan Sekretariat DPRD memiliki 5 (lima) program dan 15 kegiatan. Hasil pemetaan tersebut masih bersifat sementara karena terdapat beberapa kegiatan yang dibutuhkan dan sangat vital dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama, namun tidak tersedia di dalam Permendagri 90 tahun 2020. Dalam hal ini Sekretariat DPRD mengusulkan satu kegiatan yaitu kegiatan “Pelayanan Jasa Tamu Pemerintah Daerah dan Protokol”. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut berada pada program urusan yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah.

Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran dan aliran kas pada program dan kegiatan ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan capaian kegiatan di atas 95%.

Untuk Program dan Kegiatan tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakannya seoptimal mungkin dengan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan perkiraan mencapai 100 %, dengan batas minimal 95 % sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala OPD dengan Gubernur Sumatera Barat. Untuk tahun 2021 Sekretariat DPRD memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dengan anggaran porsi terbesar sehingga dapat memenuhi target baik fisik maupun keuangan dengan artian tetap memperhatikan program dan kegiatan lainnya.

Untuk Capaian target Renstra Sekretariat DPRD dengan realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel T.C.30, pada tabel tersebut dapat dilihat capaian target Renstra dengan Realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya, pada tabel ini Sekretariat DPRD menampilkan target Renstra Tahun 2019 dengan realisasi tahun 2019 dan perkiraan capaian pada tahun 2020.

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA OPD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	%	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
				thn (n-1)	thn (n)	thn (n+1)	thn (n-1)		thn (n)	thn (n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Kepada Pemangku Kepentingan			90	90	90	88.10	96%	90	90	
2	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja			A	A	A	BB	-	A	A	
3	Persentase capaian realisasi keuangan			95	95	95	93.04	97.9	95	97	

TABEL T.C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

KONDISI TAHUN 2019

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA OPD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2019	%	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
				thn (n- 1)	thn (n)	thn (n+1)	thn (n- 1)		thn (n)	thn (n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Kepada Pemangku Kepentingan			90	90	90	88.10	96%	90	90	
2	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja			A	A	A	BB	-	A	A	
3	Persentase capaian realisasi keuangan			95	95	95	93.04	97.9	95	97	

Berdasarkan pencapaian tahun 2019, secara global target fisik dan target keuangan kegiatan sudah tercapai, namun apabila dilihat secara parsial untuk target keuangan terdapat hampir separuh kegiatan tidak tercapai, termasuk di dalamnya program pokok kegiatan sejumlah 8 (delapan) kegiatan. Tidak tercapainya target keuangan masing-masing kegiatan dapat dipahami karena beberapa alasan logis seperti peran penggunaan dan optimalisasi keuangan bergantung kepada aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemangku kepentingan. Sekretariat dalam hal ini selalu mengedepankan pelayanan terbaik, karena fungsi utama sekretariat sejalan dengan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Untuk tahun 2021 diperkirakan target yang ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi dan pengendalian mendalam dilakukan terhadap beberapa kegiatan yang tidak mencapai target keuangan pada tahun 2019. Evaluasi dilakukan dalam bentuk mencari solusi atas masalah yang akan terjadi mengacu kepada kegiatan tahun 2019. Sedangkan pengendalian dilakukan melalui pengetatan aliran kas dari per tiga bulan menjadi per bulan, hal tersebut dirasa efektif untuk mematangkan target agar sesuai dengan perencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas dan fungsi Dewan sesuai SOP, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Program yang menyangkut dengan Program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan beberapa kegiatan. Jenis Indikator yang dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) sudah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur dukungan staf memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan, maka tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD adalah ditandai dengan terlaksananya fungsi DPRD sesuai dengan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja tahun 2021 ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tolok ukur dan Indikator Kinerja yang akan diuji yaitu Tolok ukur pertama adalah Meningkatnya Pelayanan Kepada

Pemangku Kepentingan yang ditandai dengan indikator indeks kepuasan pemangku kepentingan dengan pelaksanaan pengukuran menggunakan formula tertentu dan akan menghasilkan skor sesuai dengan atau di atas target yang telah ditetapkan. Tolok ukur kedua adalah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang diberikan oleh tim penilai dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dan kemudian adalah tolok ukur ketiga yakni Realisasi Keuangan yang mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur dengan Sekretaris DPRD. Ketiga tolok ukur ini menjadi indikator kepada Sekretariat DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur no. 45 tahun 2018.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Permendagri nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, kemudian Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berada pada struktur organisasi dengan tipe B. Dengan struktur organisasi tipe B, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari tiga bagian dengan masing-masing tiga subbagian. Pembagian tersebut bisa dianalisis bahwa sesuai dengan Permendagri 104 tahun 2016 Sekretariat DPRD lebih memperkuat fungsi dan tugas pokok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD yang terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD.

a. Tingkat Pelayanan kinerja OPD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada paragraf 2 Pasal 9 (5), dimana Sekretariat DPRD melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.

Fungsi tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sebagai pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD yang akan dijabarkan oleh masing-masing bagian di Sekretariat DPRD.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
2. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integritas, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LMS.
3. Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
 5. Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
 6. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
 7. Peningkatan hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis.
- c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah.

Dari kondisi yang kami kemukakan di atas dengan memanfaatkan peluang yang ada serta memaksimalkan staf yang ada hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021; dimana Visi Pembangunan Sumatera Barat yang ingin diwujudkan pada periode 2016–2021 adalah **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA**. Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Kedua yaitu: “**Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional**” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace) dan bersih (Clean Governace) serta profesionalisme dalam pelayanan publik” akan dilaksanakan melalui program–program OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- (I) Program Utama “**(1) Program Layanan Administrasi dan Keuangan, dan (2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**”, kemudian
- (II) Program Penunjang “(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”

Adapun sasaran kinerja utama terkait visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah “**Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan**”, dengan indikator “**Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan**” terhadap pelayanan **Sekretariat DPRD** dalam kurun waktu 5 tahun.

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
- Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Barat serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada :

- 1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
- 2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

- a. Kekuatan (***strengths***)

Pada sisi *kekuatan* terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan **penghubung** antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- 2) Dukungan **anggaran** yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- 3) Kemandirian dalam rangka optimalisasi **fasilitasi** terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 4) Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.

- b. Kelemahan (***weaknesses***)

Pada sisi *kelemahan*, terdapat faktor-faktor yaitu: “Kurangunya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan”.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

- a. Peluang (***Opportunities***)

Pada sisi *peluang*, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan public ke depan;

b. Tantangan/ancaman/hambatan (***Threats***)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- 2) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan public dan penerapannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang antara lain untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra K/L maupun Kabupaten/Kota.

- e. Dari isu-isu penting dan peluang yang kami kemukakan di atas maka untuk tahun 2021 kami akan berusaha dan merekomendasikan dengan Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan hak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD dan berdampak kepada Visi dan Misi kepala Daerah dengan mewujudkan **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional”** merumuskan program dan kegiatan yang akan dirumuskan/dikemukakan pada penelaahan usulan program dan kegiatan Rencana Kerja ini.

2.4. **Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Analisis kebutuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk program urusan maupun program pendukung. Analisis kebutuhan juga meliputi indikator kinerja yang relevan untuk kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat.

Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 90 tahun 2019, maka hampir seluruh kegiatan mengalami perubahan. Kegiatan tahun 2021 yang terkait ke dalam pemenuhan kebutuhan kelancaran kantor, sarana dan prasarana dan yang lainnya berubah menjadi sub kegiatan yang tergabung di dalam satu kegiatan yaitu kegiatan "Administrasi Umum". Untuk kegiatan urusan berubah total, namun sama dengan konsep sub kegiatan yang dikumpulkan ke dalam kegiatan.

Reviu terhadap rancangan awal rencana kerja tahun 2021 akan lebih banyak berhubungan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Rancangan awal rencana kerja 2021 terdiri dari 6 (enam) program dengan jumlah kegiatan mencapai 52 (lima puluh dua) item. Setelah dilaksanakan reviu sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, dan setelah dilaksanakan pembahasan bersama Tim Verifikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka program dan kegiatan menjadi 3 (tiga) program dan 14 (empat belas) kegiatan saja, di dalam kegiatan tersebut terakumulasi subkegiatan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) subkegiatan.

Reviu rancangan awal Rencana Kerja tahun 2021 berhubungan langsung dengan proses pemetaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Setiap kegiatan yang dipetakan sudah seharusnya memiliki relevansi pada kegiatan yang sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Namun dalam penyusunannya masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa diakomodir sehingga pemetaan baru bisa dilaksanakan sebatas nomenklatur. Hal tersebut dipengaruhi dengan jumlah pagu yang tersedia tidak akan sejalan dengan anggaran yang disusun untuk Program/Kegiatan/Subkegiatan anggaran tahun 2021. Untuk tahap reviu masih ditampilkan sesuai dengan nomenklatur kegiatan lama dan belum menggunakan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Sesuai anggaran yang tercantum pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021 yang telah direvisi pada tahun 2018, Sekretariat DPRD menelaah dalam bentuk rencana strategis memperoleh pagu indikatif sesuai dengan rencana kerja rancangan awal, dan setelah direviu tidak terdapat perbedaan kebutuhan anggaran awal dan akhir. Sehingga berikut ditampilkan tabel reviu anggaran pada rencana kerja rancangan awal.

TABEL.T.C.31
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	SEKRETARIAT DPRD				127,030,000,000					127,030,000,000
I	NON URUSAN				55,003,000,000	NON URUSAN				55,003,000,000
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran				23,596,000,000	Pelayanan Administrasi Perkantoran				23,596,000,000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Terkirimnya surat dan paket untuk kepentingan dinas	100%	223,325,089	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	Terkirimnya surat dan paket untuk kepentingan dinas	100%	223,325,089
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet	100%	8,085,472,081	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, dan internet	100%	8,085,472,081
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan asuransi gedung	100%	585,162,500	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan asuransi gedung	100%	585,162,500
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Padang	Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan	100%	3,087,397,135	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Padang	Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan	100%	3,087,397,135
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Prov. Sumbar	100%	198,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang	Terwujudnya Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Prov. Sumbar	100%	198,250,000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Tercapainya ketersediaan ATK	100%	180,473,600	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Tercapainya ketersediaan ATK	100%	180,473,600

7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Padang	Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan	100%	302,610,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Padang	Tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak/digandakan dari jumlah yang dibutuhkan	100%	302,610,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang	Tercapainya kebutuhan penerangan pada bangunan /ruangan yang ada pada kantor sekretariat dewan	100%	94,214,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang	Tercapainya kebutuhan penerangan pada bangunan /ruangan yang ada pada kantor sekretariat dewan	100%	94,214,400
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang	Tercapainya ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada kantor sekretariat DPRD	100%	64,305,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang	Tercapainya ketersediaan peralatan rumah tangga yang ada pada kantor sekretariat DPRD	100%	64,305,000
10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD	100%	682,590,000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Tersedianya referensi bahan bacaan bagi pegawai Sekretariat DPRD	100%	682,590,000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Terwujudnya Ketersediaan makan dan minum rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD	100%	2,579,630,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Terwujudnya Ketersediaan makan dan minum rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD	100%	2,579,630,000
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Padang	Lancarnya Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi	100%	7,048,774,595	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Padang	Lancarnya Pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi	100%	7,048,774,595
13	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Meningkatnya Ketahanan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD	100%	70,800,000	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Meningkatnya Ketahanan Rohani dan Jasmani Staf Sekretariat DPRD	100%	70,800,000
14	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	Padang	Tertatanya Administrasi arsip dengan baik	100%	295,095,600	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	Padang	Tertatnya Administrasi arsip dengan baik	100%	295,095,600
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	683,062,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	683,062,500
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				26,265,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				26,265,000,000

1	Pengadaan Mebeleur	Padang	Tercapainya ketersediaan meubelair yang ada pada kantor Sekretariat DPRD	100%	1,600,000,000	Pengadaan Mebeleur	Padang	Tercapainya ketersediaan meubelair yang ada pada kantor Sekretariat DPRD	100%	1,600,000,000
2	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas/Mess	Padang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	100%	450,200,000	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas/Mess	Padang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	100%	450,200,000
3	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	48,000,000	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	48,000,000
4	Pengadaan Mebeleur	Padang	Tersedianya Mebeuleur	100%	567,480,000	Pengadaan Mebeleur	Padang	Tersedianya Mebeuleur	100%	567,480,000
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	48,000,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	48,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Jabatan	100%	353,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Jabatan	100%	353,000,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas	100%	355,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas	100%	355,000,000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	1,441,300,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	1,441,300,000
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan	100%	443,014,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan	100%	443,014,000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	806,659,750	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	806,659,750
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Per	100%	177,550,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Per	100%	177,550,000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan	100%	574,500,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan	100%	574,500,000

	Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor		Rutin/Berkala Peralatan/Per			Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor		Rutin/Berkala Peralatan/Per		
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Mebeleur	100%	241,750,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Mebeleur	100%	241,750,000
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	100%	574,500,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	100%	574,500,000
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	8,923,099,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	8,923,099,000
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Padang	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan	100%	8,952,727,250	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Padang	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Jabatan	100%	8,952,727,250
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio,	100%	154,200,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio,	100%	154,200,000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Komputerisasi	100%	46,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Komputerisasi	100%	46,000,000
19	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	100%	318,020,000	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	100%	318,020,000
20	Pengadaan Peralatan Studio komunikasi dan informasi	Padang	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Studio komunikasi dan Informasi	100%	190,000,000	Pengadaan Peralatan Studio komunikasi dan informasi	Padang	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Studio komunikasi dan Informasi	100%	190,000,000
C	Peningkatan Disiplin Aparatur				2,180,000,000	Peningkatan Disiplin Aparatur				2,180,000,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Padang	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	2,180,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Padang	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100%	2,180,000,000
D	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1,006,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1,006,000,000

1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Terdapatnya jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK	100%	458,100,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Terdapatnya jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK	100%	458,100,000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	100%	547,900,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang	Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	100%	547,900,000
E	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1,956,000,000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1,956,000,000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPC, LAKIP dan PK serta Laporan Keuangan)	100%	350,000,738	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Tersedianya buku laporan kinerja kegiatan (LPPD, LKPC, LAKIP dan PK serta Laporan Keuangan)	100%	350,000,738
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Lancarnya pengelolaan Administrasi keuangan SKPD	100%	513,437,261	Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Lancarnya pengelolaan Administrasi keuangan SKPD	100%	513,437,261
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Tersedianya Renja, RKA, DPA	100%	520,693,500	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Tersedianya Renja, RKA, DPA	100%	520,693,500
4	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Padang	Tertatanya administrasi asset dengan baik	100%	571,868,501	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Padang	Tertatanya administrasi asset dengan baik	100%	571,868,501
F	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				72,027,000,000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				72,027,000,000
1	Pembahasan Rancangan Perda	Padang	Tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah	100%	24,500,046,450	Pembahasan Rancangan Perda	Padang	Tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah	100%	24,500,046,450

2	Reses	Padang	Terjaring aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat	100%	6,925,931,000	Reses	Padang	Terjaring aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat	100%	6,925,931,000
3	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Padang	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	100%	4,155,022,900	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Padang	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	100%	4,155,022,900
4	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dan Sekretaris DPRD	Padang	Meningkatnya kualitas pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang	100%	4,955,940,000	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota Dan Sekretaris DPRD	Padang	Meningkatnya kualitas pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang	100%	4,955,940,000
5	Sosialisasi Peraturan Dan Perundang-undangan	Padang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	100%	1,956,560,000	Sosialisasi Peraturan Dan Perundang-undangan	Padang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	100%	1,956,560,000
6	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Komisi Luar Daerah	Padang	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	100%	15,789,395,400	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Komisi Luar Daerah	Padang	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	100%	15,789,395,400
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	Padang	Terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah	100%	2,003,608,460	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	Padang	Terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah	100%	2,003,608,460
8	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	Padang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum	100%	224,255,800	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	Padang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum	100%	224,255,800
9	Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda	Padang	Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi	100%	388,843,000	Seminar Dalam Rangka Pembahasan Ranperda	Padang	Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi	100%	388,843,000

10	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Padang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	100%	2,343,352,850	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Padang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	100%	2,343,352,850
11	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat	Padang	Meningkatnya aspirasi yang disalurkan melalui pemangku kepentingan	100%	578,552,000	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat	Padang	Meningkatnya aspirasi yang disalurkan melalui pemangku kepentingan	100%	578,552,000
12	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Padang	Meningkatnya Kepatuhan OPD mitra dalam melaksanakan kegiatan/ pembangunan	100%	2,597,000,140	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Padang	Meningkatnya Kepatuhan OPD mitra dalam melaksanakan kegiatan/ pembangunan	100%	2,597,000,140
13	Pembahasan Penyusunan APBD	Padang	Disepakatinya rancangan KUAPPAS, KUPA PPAS, APBD dan APBD Perubahan	100%	5,108,272,000	Pembahasan Penyusunan APBD	Padang	Disepakatinya rancangan KUAPPAS, KUPA PPAS, APBD dan APBD Perubahan	100%	5,108,272,000
14	Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Padang	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban Kepala Daerah	100%	500,220,000	Pembahasan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Padang	Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban Kepala Daerah	100%	500,220,000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pengusulan program untuk tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh Permendagri nomor 90 tahun 2019. Amanat tersebut memang harus dilaksanakan yang bertujuan untuk kepentingan nasional dimana salah satu tujuan dari Permendagri tersebut tidak lain adalah untuk menyeragamkan nomenklatur kegiatan dan program. Dengan dilaksanakannya penyeragaman tersebut diharapkan seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan bisa diukur dan diketahui keberhasilannya melalui angka-angka yang pasti. Apabila dibandingkan dengan tahun berjalan (2020) maka perbedaannya sangat mencolok karena seluruh kegiatan tahun 2021 dipetakan berdasarkan Nomenklatur yang terdapat di dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019.

Dapat dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum menerima usulan dari masyarakat program dan kegiatan yang diusulkan ini adalah murni dari Sekretariat DPRD karena untuk mendukung kelancaran tugas dalam rangka memfasilitasi tugas-tugas DPRD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kalau diperhatikan program dan kegiatan yang diusulkan tahun 2021 apabila dikaitkan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dirasa tidak akan berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD karena hanya program yang berubah dalam pengusulan program tahun 2021 namun kegiatan yang disajikan masih relevan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang secara Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis bertanggung jawab kepada DPRD yaitu membantu kelancaran tugas-tugas DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Menyangkut kebijakan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemerintahan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat pada Prioritas II Yaitu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan, Sekretariat DPRD mendukung rencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Reformasi Birokrasi dibidang pemerintahan yaitu dengan meningkatkan Disiplin Aparatur, mencegah terjadinya perbuatan KKN, meningkatkan kemampuan SDM dibidang tugasnya. dan mendukung pelaksanaan Program Nasional yaitu Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program Pokok yang tertuang dalam dokumen RPJMN yang diakomodir dalam RPJMD yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah adalah satu program nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan beberapa kegiatan yang mempunyai sasaran, tujuan dan kebijakan sudah sesuai dengan Kebijakan Nasional dan ditambah dengan beberapa program lainnya sebagai pendukung program pokok dalam memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan hak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Program dan kegiatan tersebut sudah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Maka sesuai dengan pernyataan Visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan hasil penyempurnaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI yang dilaksanakan oleh seluruh OPD.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Kedua yaitu: **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governace) dan bersih (Clean Governace) serta profesionalisme pelayanan publik”

Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2016 s/d 2021, adalah :

“Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan”

“Meningkatkan Tata Kelola Organisasi”

Sasaran yang ingin akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sasaran yang telah ditetapkan antara lain;

1. Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, serta mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang struktur organisasi.

Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan kebijaksanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Melakukan evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan.
3. Melaksanakan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan agar kualitas sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima.
5. Melaksanakan bimtek dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah yang didukung oleh Visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan tahun 2021, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pemetaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan mengusulkan serta merencanakan program/kegiatan/subkegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
I	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Renstra dan Rencana Perangkat Daerah
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
III	Administrasi Umum
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8	Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15	Pengadaan Mebeleur
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
27	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
28	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
29	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
30	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
32	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
33	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
34	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
IV	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3	Pengadaan Pakaian Korpri
4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5	Pemulangan Pegawai yang Pensiun

6	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
7	Pendidikan dan Pelatihan Formal
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
B	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
I	Layanan Administrasi DPRD
1	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan, dan Kepegawaian DPRD
2	Fasilitasi Rapat DPRD
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD
II	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
C	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
I	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2	Pembahasan Rancangan Perda
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD
II	Pembahasan Kebijakan Anggaran
1	Pembahasan KUA dan PPAS
2	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
3	Pembahasan APBD
4	Pembahasan APBD Perubahan
5	Pembahasan Laporan Semester
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran
IV	Peningkatan Kapasitas DPRD
1	Orientasi DPRD
2	Bimbingan Teknis DPRD
3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD
3	Pelaksanaan Reses
VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
1	Penyusunan Kode Etik DPRD
2	Pengawasan Kode Etik DPRD
VII	Pembahasan Kerja Sama Daerah
1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
VIII	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merencanakan 3 (tiga) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 14 (empat belas) kegiatan yang terbagi ke dalam subkegiatan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) buah. Berdasarkan pemetaan kegiatan, untuk pelaksanaan gaji dan tunjangan Anggota DPRD dan ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD tahun 2021 penempatannya berada pada subkegiatan pada rincian program/kegiatan yang dipetakan. Sehingga dari total 87 subkegiatan terdapat kegiatan yang mengakomodir gaji dan tunjangan Anggota DPRD dan ASN di Lingkungan DPRD. Adapun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat total plafon dana sebesar Rp. 127.030.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar tiga puluh juta rupiah), belum termasuk kegiatan gaji dan tunjangan (belanja tidak langsung) dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Kebutuhan Anggaran
SEKRETARIAT DPRD		127,030,000,000
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	51,156,808,480
I	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,152,832,800
1	Penyusunan Renstra dan Rencana Perangkat Daerah	256,004,000
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	375,328,500
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	265,200,000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	256,300,300
II	Administrasi Keuangan	339,668,600
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-
2	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	194,603,600
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	145,065,000
III	Administrasi Umum	47,864,527,080
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	223,315,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,069,660,650
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450,000,000
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	962,500,000
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	585,162,500
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	806,659,750
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	325,055,200
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,087,397,135
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	528,000,000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180,473,600
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	302,610,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94,124,400
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,054,220,000
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70,345,000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	682,590,000

16	Penyediaan Makanan dan Minuman	2,579,630,000
17	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	7,048,774,595
18	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	250,000,000
19	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	478,000,000
20	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	285,000,000
21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1,050,000,000
22	Pengadaan Mebeleur	550,000,000
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	335,000,000
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	120,000,000
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,034,228,000
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	486,754,000
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	600,700,000
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	185,000,000
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	328,700,000
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	165,000,000
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2,015,800,000
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	341,252,000
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	6,052,727,250
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	6,535,848,000
IV	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,799,780,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	108,780,000
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	85,000,000
3	Pengadaan Pakaian Korpri	95,500,000
4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu	110,500,000
5	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	24,000,000
6	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	20,000,000
7	Pendidikan dan Pelatihan Formal	537,500,000
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	458,100,000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	360,400,000
B	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	6,449,045,000
I	Layanan Administrasi DPRD	4,940,485,000
1	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan, dan Kepegawaian DPRD	-
2	Fasilitasi Rapat DPRD	3,048,985,000
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	450,200,000
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	1,441,300,000
II	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1,508,560,000
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	-
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1,310,310,000
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	198,250,000
C	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	69,424,146,520

I	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	27,708,204,850
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2,097,042,000
2	Pembahasan Rancangan Perda	23,019,715,850
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	217,725,000
4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	1,846,142,000
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	527,580,000
II	Pembahasan Kebijakan Anggaran	7,404,767,530
1	Pembahasan KUA dan PPAS	1,039,263,300
2	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	1,029,635,100
3	Pembahasan APBD	1,915,527,400
4	Pembahasan APBD Perubahan	2,225,188,935
5	Pembahasan Laporan Semester	-
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1,195,152,795
III	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9,868,442,500
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1,624,900,420
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1,624,900,420
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1,624,900,420
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1,624,900,420
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1,624,900,420
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	871,970,200
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	871,970,200
IV	Peningkatan Kapasitas DPRD	10,136,054,440
1	Orientasi DPRD	-
2	Bimbingan Teknis DPRD	4,287,185,000
3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4,390,869,440
4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1,003,000,000
5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	455,000,000
V	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	8,912,187,000
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	2,014,856,000
2	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	61,731,000
3	Pelaksanaan Reses	6,835,600,000
VI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	310,168,200
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	129,022,900
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	181,145,300
VII	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1,900,000,000
1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1,900,000,000
VIII	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3,184,322,000
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3,184,322,000

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T.C.33 berikut:

Tabel T.C.33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2021				Rencana Maju tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			95%	51,156,808,480	APBD	95%	57,295,625,498
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Padang	85%	1,152,832,800	APBD	85%	1,291,172,736
1	Penyusunan Renstra dan Rencana Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Padang	2 dokumen	56,004,000	APBD	2 dokumen	286,724,480
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	Padang	9 Dokumen	75,328,500	APBD	9 Dokumen	420,367,920
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Perangkat daerah (LAKIP, LPPD, LKPJ, Laporan tahunan)	Padang	9 Dokumen	265,200,000	APBD	9 Dokumen	297,024,000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan	Padang	4 Dokumen	256,300,300	APBD	4 Dokumen	287,056,336
B	Administrasi Keuangan	Tertib Administrasi Keuangan	Padang	12 Bulan	339,668,600	APBD	12 Bulan	339,668,600

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	12 Bulan	-	APBD	12 Bulan	-
2	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan Aset Semesteran, Laporan keuangan Bulanan dan Semesteran	Padang	2 laporan, 13 laporan	194,603,600	APBD	2 laporan, 13 laporan	217,956,032
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Aset Akhir tahun, Laporan Keuangan akhir tahun	Padang	1 laporan, 1 laporan	145,065,000	APBD	1 laporan, 1 laporan	162,472,800
C	Administrasi Umum	Tertib Administrasi Umum	Padang	12 Bulan	47,864,527,080	APBD	12 Bulan	53,608,270,330
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang didistribusikan	Padang	1600 surat	223,315,000	APBD	1600 surat	250,112,800
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening tagihan yang dibayarkan	Padang	12 Bulan	7,069,660,650	APBD	12 Bulan	7,918,019,928
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Padang	12 bulan	450,000,000	APBD	12 bulan	504,000,000
4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jasa Kesehatan,rohaniwan, dan dukungan penerapan new normal	Padang	12 bulan	962,500,000	APBD	12 bulan	1,078,000,000
5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jasa Jaminan Gedung kantor, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda enam	Padang	5 unit, 20 unit, 39 unit, 4 unit	585,162,500	APBD	5 unit, 20 unit, 39 unit, 4 unit	655,382,000
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas/operasional	Padang	63 unit	806,659,750	APBD	63 unit	903,458,920
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jaas Administrasi Keuangan (Pengelola Kegiatan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem	Padang	12 Bulan	325,055,200	APBD	12 Bulan	364,061,824

		informasi, petugas PPHPK)						
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan, Keamanan, dan sopir, dan honor PTT	Padang	12 Bulan	3,087,397,135	APBD	12 Bulan	3,457,884,791
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	Padang	12 Bulan	528,000,000	APBD	12 Bulan	591,360,000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	Padang	12 Bulan	180,473,600	APBD	12 Bulan	202,130,432
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Padang	12 Bulan	302,610,000	APBD	12 Bulan	338,923,200
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Padang	12 Bulan	94,124,400	APBD	12 Bulan	105,419,328
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Padang	12 Bulan	2,054,220,000	APBD	12 Bulan	2,300,726,400
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga yang disediakan	Padang	12 Bulan	70,345,000	APBD	12 Bulan	78,786,400
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Padang	12 Bulan	682,590,000	APBD	12 Bulan	764,500,800
16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum rapat yang disediakan	Padang	12 Bulan	2,579,630,000	APBD	12 Bulan	2,889,185,600
17	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Padang	12 Bulan	7,048,774,595	APBD	12 Bulan	7,894,627,546
18	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Peralatan rumah jabatan yang diadakan	Padang	5 Jenis	250,000,000	APBD	5 Jenis	280,000,000

19	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung kantor yang diadakan	Padang	4 unit	478,000,000	APBD	4 unit	535,360,000
20	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Peralatan rumah jabatan yang diadakan	Padang	5 unit	285,000,000	APBD	5 unit	319,200,000
21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung kantor yang diadakan	Padang	10 Jenis	1,050,000,000	APBD	10 Jenis	1,176,000,000
22	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur yang diadakan	Padang	3 Jenis	550,000,000	APBD	3 Jenis	616,000,000
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rumah Jabatan yang dipelihara	Padang	1 unit	335,000,000	APBD	1 unit	375,200,000
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rumah dinas yang dipelihara	Padang	1 Unit	120,000,000	APBD	1 Unit	134,400,000
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	Padang	1 Unit	1,034,228,000	APBD	1 Unit	1,158,335,360
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Mobil Jabatan yang dipelihara	Padang	4 unit	486,754,000	APBD	4 unit	545,164,480
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	Padang	63 unit	600,700,000	APBD	63 unit	672,784,000
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Perlengkapan rumah jabatan yang dipelihara	Padang	5 Jenis	185,000,000	APBD	5 Jenis	207,200,000
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Padang	12 Bulan	328,700,000	APBD	12 Bulan	368,144,000
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Peralatan rumah jabatan yang dipelihara	Padang	20 unit	165,000,000	APBD	20 unit	184,800,000
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Padang	12 bulan	2,015,800,000	APBD	12 bulan	2,257,696,000
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Mebeleur yang dipelihara	Padang	60 unit	341,252,000	APBD	60 unit	382,202,240
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Rumah Jabatan yang direhab	Padang	1 Unit	6,052,727,250	APBD	1 Unit	6,779,054,520

34	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Gedung Kantor yang direhab	Padang	1 Unit	6,535,848,000	APBD	1 Unit	7,320,149,760
D	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Padang	60%	1,799,780,000	APBD	60%	2,015,753,600
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Padang	130 Stel	108,780,000	APBD	130 Stel	121,833,600
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan	Padang	130 Stel	85,000,000	APBD	130 Stel	95,200,000
3	Pengadaan Pakaian Korpri	Pakaian korpri yang disediakan	Padang	130 Stel	95,500,000	APBD	130 Stel	106,960,000
4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Padang	130 Stel	110,500,000	APBD	130 Stel	123,760,000
5	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pegawai yang pensiun	Padang	10 Orang	24,000,000	APBD	10 Orang	26,880,000
6	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Pegawai yang tewas dalam tugas	Padang	10 Orang	20,000,000	APBD	10 Orang	22,400,000
7	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	Padang	128 Kali	537,500,000	APBD	128 Kali	602,000,000
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dan yang diikuti	Padang	60 Kali	458,100,000	APBD	60 Kali	513,072,000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	Padang	25 Orang	360,400,000	APBD	25 Orang	403,648,000
II	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tertib Administrasi Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD	Padang	12 bulan	6,449,045,000	APBD	12 bulan	7,222,930,400

A	Layanan Administrasi DPRD	Tertib Layanan Administrasi DPRD	Padang	12 bulan	4,940,485,000	APBD	12 bulan	5,533,343,200
1	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan, dan Kepegawaian DPRD	Administrasi, Ketatausahaan, dan Kepegawaian DPRD yang diselenggarakan	Padang	12 bulan	-	APBD	12 bulan	-
2	Fasilitasi Rapat DPRD	Rapat DPRD yang difasilitasi	Padang	36 kali	3,048,985,000	APBD	36 kali	3,414,863,200
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Kebutuhan Pokok Ketua DPRD	Padang	12 bulan	450,200,000	APBD	12 bulan	504,224,000
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Sarana dan Prasarana Kantor DPRD yang diadakan dan dipelihara	Padang	12 bulan	1,441,300,000	APBD	12 bulan	1,614,256,000
B	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Padang	12 bulan	1,508,560,000	APBD	12 bulan	1,689,587,200
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Administrasi Keuangan DPRD yang diselenggarakan (Gaji, Tunjangan, dan Biaya Operasional Pimpinan)	Padang	12 bulan	-	APBD	12 bulan	-
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Lambang Daerah untuk PAW, Pakaian Daerah, PDH, PSH, PSL untuk PAW, PSR	Padang	5 unit, 65 stel, 65 stel, 130 stel, 5 stel, 65 stel.	1,310,310,000	APBD	5 unit, 65 stel, 65 stel, 130 stel, 5 stel, 65 stel.	1,467,547,200
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check UP	Padang	65 orang	198,250,000	APBD	65 orang	222,040,000

III	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	[1] Terlaksananya Pemahaman dan Penetapan rancangan APBD tepat waktu [2] Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi [3] Jumlah Perda yang disetujui Jumlah Perda yang disetujui [4] Jumlah Rekomendasi yang diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Padang	[1] 12 bulan [2] 5 Inovasi [3] 19 Perda [4] 3 rekomendasi	69,424,146,520	APBD	[1] 12 bulan [2] 5 Inovasi [3] 19 Perda [4] 3 rekomendasi	77,755,044,102
A	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembahasan Ranperda dan Peraturan DPRD	Padang	14 ranperda	27,708,204,850	APBD	14 ranperda	31,033,189,432
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD	Padang	14 Keputusan	2,097,042,000	APBD	14 Keputusan	2,348,687,040
2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah pembahasan Ranperda dan Keputusan DPRD	Padang	14 keputusan	23,019,715,850	APBD	14 keputusan	25,782,081,752
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Kajian	Padang	2 Kajian	217,725,000	APBD	2 Kajian	243,852,000
4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik	Padang	5 dokumen	1,846,142,000	APBD	5 dokumen	2,067,679,040
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Keputusan	Padang	5 Keputusan	527,580,000	APBD	5 Keputusan	590,889,600
B	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Padang	6 pembahasan	7,404,767,530	APBD	6 pembahasan	8,293,339,634
1	Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah kesepakatan	Padang	1 dokumen	1,039,263,300	APBD	1 dokumen	1,163,974,896

2	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	jumlah kesepakatan	Padang	1 dokumen	1,029,635,100	APBD	1 dokumen	1,153,191,312
3	Pembahasan APBD	jumlah kesepakatan	Padang	1 dokumen	1,915,527,400	APBD	1 dokumen	2,145,390,688
4	Pembahasan APBD Perubahan	jumlah kesepakatan	Padang	1 dokumen	2,225,188,935	APBD	1 dokumen	2,492,211,607
5	Pembahasan Laporan Semester	jumlah kesepakatan	Padang	1 buah	-	APBD	1 buah	-
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah kesepakatan	Padang	1 dokumen	1,195,152,795	APBD	1 dokumen	1,338,571,130
C	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan	Padang	12 bulan	9,868,442,500	APBD	12 bulan	11,052,655,600
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	target pelaksanaan pembangunan	Padang	1 dokumen	1,624,900,420	APBD	1 dokumen	1,819,888,470
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	target pelaksanaan pembangunan	Padang	1 dokumen	1,624,900,420	APBD	1 dokumen	1,819,888,470
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	target pelaksanaan pembangunan	Padang	1 dokumen	1,624,900,420	APBD	1 dokumen	1,819,888,470
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	target pelaksanaan pembangunan	Padang	1 dokumen	1,624,900,420	APBD	1 dokumen	1,819,888,470
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	target pelaksanaan pembangunan	Padang	1 dokumen	1,624,900,420	APBD	1 dokumen	1,819,888,470
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	jumlah kesepakatan	Padang	1 dokumen	871,970,200	APBD	1 dokumen	976,606,624
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah kesepakatan	Padang	1 dokumen	871,970,200	APBD	1 dokumen	976,606,624

D	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan pemahaman Anggota DPRD terhadap Tupoksinya	Padang	80%	10,136,054,440	APBD	80%	11,352,380,973
1	Orientasi DPRD	Pelaksanaan Orientasi	Padang	0 kali	-	APBD	0 kali	-
2	Bimbingan Teknis DPRD	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	Padang	6 kali	4,287,185,000	APBD	6 kali	4,801,647,200
3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Dokumen Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Kedewanan	Padang	12 bulan	4,390,869,440	APBD	12 bulan	4,917,773,773
4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya tim ahli dan pakar	Padang	12 orang	1,003,000,000	APBD	12 orang	1,123,360,000
5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	Padang	7 orang	455,000,000	APBD	7 orang	509,600,000
E	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang tertampung	Padang	100%	8,912,187,000	APBD	100%	9,981,649,440
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	terlaksananya fungsi pembentukan perda, pengawasan dan komisi komisi dalam daerah	Padang	12 kegiatan	2,014,856,000	APBD	12 kegiatan	2,256,638,720
2	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Jumlah aspirasi	Padang	60 dokumen	61,731,000	APBD	60 dokumen	69,138,720
3	Pelaksanaan Reses	Jumlah aspirasi	Padang	3 dokumen	6,835,600,000	APBD	3 dokumen	7,655,872,000
F	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Kepatuhan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas	Padang	100%	310,168,200	APBD	100%	347,388,384
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah keputusan	Padang	3 dokumen	129,022,900	APBD	3 dokumen	144,505,648
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah keputusan	Padang	3 keputusan	181,145,300	APBD	3 keputusan	202,882,736

G	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Padang	12 bulan	1,900,000,000	APBD	12 bulan	2,128,000,000
1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen komunikasi dan publikasi	Padang	12 dokumen	1,900,000,000	APBD	12 dokumen	2,128,000,000
H	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Pelaksanaan Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Padang	12 bulan	3,184,322,000	APBD	12 bulan	3,566,440,640
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen rekomendasi	Padang	12 rekomendasi	3,184,322,000	APBD	12 rekomendasi	3,566,440,640

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Kerja (Renja) ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergis antar unit kerja organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan atau dengan Dinas, Badan, Lembaga, dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tuntutan masyarakat, dengan harapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua tingkatan dalam unit organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat menjadi perhatian kita bersama bahwa usulan program dan kegiatan ini adalah merupakan usulan program dari masing-masing pemangku kepentingan (Bagian) di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah Sumatera Barat maka kami berharap usulan program dan kegiatan ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk dapat direalisasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 karena program dan kegiatan yang diajukan ini adalah menyangkut kepentingan bersama dalam mendukung visi dan misi kepada daerah dan menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian harapan kita agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita bersama terutama bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 24 Oktober 2020

Sekretaris DPRD
Provinsi Sumatera Barat



H. Rafi Is, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640930 198602 1 002